

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
Perkembangan Hukum Agraria	18B01224102	2	Hukum Keagrariaan	II
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset dan Inovasi	
	Tanda Tangan Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H.		Tanda Tangan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.	
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH				
S4	Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman.			
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah,			
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah			
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum			
KK2	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif			

KK4	Mampu memutuskan dan menyelesaikan masalah atau kasus hukum secara tepat
P2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
P3	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang hukum
P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR	
Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu dan menguasai prinsip-prinsip hukum agraria nasional, konsep hukum agraria nasional yang berlaku pada masa lampau dan saat ini, mampu memberikan penyelesaian-penyelesaian yang solutif terhadap berbagai permasalahan hukum di bidang agraria dan mampu menelaah dan menganalisa berbagai implikasi hukum dari pengaturan kebijakan di bidang agraria dan menyelaraskan dengan perkembangan global dengan tetap berpegang pada ideologi, konstitusi dan sistem pemerintahan negara.	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
Mata kuliah ini membahas dan mengkaji tentang hukum agraria, ruang lingkup hukum agraria, perkembangan hukum agraria, keberlakuan hukum agraria di Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Mata kuliah ini juga membahas tentang perkembangan kebijakan di bidang hukum agraria di masa orde baru dan reformasi serta pemerintahan saat ini. Membahas tentang program-program pemerintah terkait hukum agraria: land reform, reforma agraria, pengelolaan dan pemanfaatan SDA Agraria serta pengaruh global terhadap pengaturan hukum di bidang agraria saat ini dan kedepan.	

Daftar Referensi:

1. A.D.A. De Kat Anggelino, *Colonial Policy*, Marthinus Nijhoff, The Hague, 1931.
2. Abdurrahman, *Tebaran Pemikiran Mengenai Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1985.
3. Abel Wilhelm, *Agraria Politik*, Gotingen Vanderhoeck & Ruprech, 1951.
4. Ahmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konpress, Jakarta, 2012.
5. Adrian Sutedi, *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan*, Cipta Jaya, Jakarta, 2006.
6. Alisa Zainuddin, *A Short History of Indonesia*, Cassel Australia, Ltd., Victoria, 1968.

7. AP. Parlindungan, *Aneka Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1983.
8., *Komentor atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
9. Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.

10.dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Press, 2008.
11. ASS. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publishers, Jakarta, 2002.
12. Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.
13. Bela Mukhoti, *Agriculture and Development in Developing Countries- Strategies for Effective Rural Development*, Westview Press, Boulder and London, 1985.
14. Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi Penegakan Hukum*, Pustaka Margareta, Jakarta, 2011.
15. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2005.
16., *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999.
17. Bremen. Jan, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja di Jawa di Masa Kolonial*. LP3ES, 1986
18. Chen-Cheng, *Land Reform in Taiwan*, China Publishing Company, Taipei, 1961.
19. Cohen Mt, J.B, *Inleiding Tot Het Agraris Recht Haarlem De Erven F. Bohn*, 1927.
20. David Osborne and Ted Goebler, *Reinventing Government*, A Plume Book, New York, 1993.
21. Dianto Bachriadi, (editor, et-al), *Reformasi Agraria, Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997.
22. Edy Ruchiyat, *Politik Pertahanan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 1999.
23. Elly, Richard T & Wehrwein, George S, *Land Economics*, The University of Wisconsin Press, 1964.
24. Endang Suhendar, *Menuju Keadilan Agraria (70 Tahun Gunawan Wiradi)*, Akatiga, Bandung, 2002.
25. Erman Rajagukguk, *Indonesia: Hukum Tanah di Zaman Penjajahan*, tanpa tahun dan tidak dipublikasikan.
26. Espiritu Ph.D. C., Socorro & Angel O, Yoingco Ph.D., *Philippine Agraria Reform and the New Taxation*, Katha Publishing Co. Inc. 388, Quezon Avenue, Quezon City 1983

27. Firman Muntaqo, *Harmonisasi Hukum Investasi di Bidang Perkebunan*, Usulan Penelitian Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
28. Geoff Forrester (ed.), *Indonesia Pasca Soeharto*, Tajidu Press, Yogyakarta, 2002.
29. Herman Haeruman, *Suatu Pemikiran dalam Reformasi Sistem Agraria, Membentuk Sisrem Pertahanan Positif Yang Lebih Efektif Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Opening Remarks International Conference on Land Policy Reform*, Jakarta, Bappenas RI, 26 Juli 2000.
30. Hiroyoshi Kano, *Land Tenure System and the Desa Community in Nineteenth Century Java*, Institute of Development Economics, Tokyo, 1977.
31. Hung-Choo Tai, *Land Reforms and Politics: Comparative Analysis*, University of California Press, Berkeley, 1974.
32. Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
33. Iman Soetikojo, *Hukum Politik dan Agraria, Departemen Pendidikan Kebudayaan Universitas Terbuka*. 1988.
34., *Politik Agraria UUPA*, Universitas Gadjah Mada Press. 1985.
35., *Proses Terjadinya UUPA*, Universitas Gadjah Mada Press. 1987.
36., *Politik Agraria Nasional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
37., *Proses Terjadinya UUPA, Peran serta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987.
38. Jacoby Erich H, *Agrarian Unrest in South East Asia*, New York Columbus University Press, 1949.
39. Jacoby Erich H, *Man and Land*, The Fundamental Issue in Development Andre Deutsch Limited 105, 105 Greet Russel Street, London WCI, 1971.
40. Johnson, Webster V & Raleigh Barlowe, *Land Problem and Politics*, Mc Craw Hill Book Company ins 1954 New York, London, Toronto.
41. King, Russel, *Landreform*, A world Review Westview Press, 1977 Boulder Colorado.
42. Loekito – Darjadi Ir, MS.C, *Aspek-aspek Perlindungan Sumber Daya Hayati Perairan*, Hasil Lokakarya RUU Perikanan 1980 Buku II Lampiran II Dep. Pertanian Jakarta.
43. M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Derah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
44. Maria R Ruwiasuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria, Membogkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
45. Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Buku Kompas, 2007.

46. Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Edisi revisi, Kompas, Jakarta, 2001.
47. Massen Mr. C.C.J en Hens A.P.G, *Agrarische Regelingen Voor het Gouvernements Gebied Van Java en Madura*, Deel I Eerste shek Drunkkerij Ruygrok & Co Batavia, 1934.
48. Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria II*, Penerbit Tjakrawala, Jakarta, 1952.
49. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Hukum dan Politik di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
50. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
51. Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, Yogyakarta, 2005.
52. Muchsan, *Hukum Tanah Nasional, Pustaka Harapan*, Jakarta, 1981.
53. Muchsin HLM. dkk, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
54. Muchsin HLM., Imam Koeswahjono & Saimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
55. Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Milik Atas Tanah, Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologi*, Republika, Jakarta, 2008.
56. Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara Paradigma Baru untuk Reforma Agraria*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.
57. Noer Fauzi & Dianto Bachriadi, *Hak Menguasai dari Negara (HMN) Persoalan Sejarah yang Harus Diselesaikan, dalam: "Usulan Revisi UUPA 1960;" Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat atas Sumber-Sumber Agraria"*, KRHN & KPA, Jakarta, 1998.
58. Noer Fauzi Rachman, *The Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movements in Indonesia*, University of California, Berkeley, 2011.
59. Noer Fauzi, *Keadilan Agraria Di Masa Transisi, Dalam Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Dalam Kehidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Lapera Putaka Utama, Yogyakarta, 2001.
60. Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
61. Notonagora, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1972.
62. Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.
63. Priyatna Abdurrasyid Prof. Dr., *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967*, BPHN Penerbit Binacipta, 1977

64. Rajawali Foundation, *From Reformasi to Institutional Transformation: A strategic Assessment of Indonesia's Prospects for Growth, Equity and Democratic*, Harvard Kennedy School Indonesia Program, Harvard, USA, 1986.
65. Sadjarwo dalam Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Bagian Pertama, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan ke xix, Jakarta, Djambatan.
66. Sarjita, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah*, Tugujoogja Pustaka, Yogyakarta, 2005.
67. Sartono Kartodirjo, *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agraria Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Countries*, Oxford University Press, New York, 1973.
68. Soegiarto, *Permasalahan Pertanahan Nasional*, BPN Pusat, Jakarta, 2000.
69. Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosio-Politik Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1994.
70. Sudargo Gautama, *Masalah Agraria, Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh*, Alumni, Bandung, 1973.
71. Ter Haar Bzn. Mr. B., *Beginselen Stelsel van het Adatrecht*, J.B. Wolters – Groningen, Jakarta, 1950
72. Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
73. Walinsky (Editor), *Agrarian Reform as Unfinished Business*, The Selected Papers of Wolf Ladejinsky Oxford University Press. 1977.
74. Warriner Doreen, *Landreform and Development in the Middle East*, Royal Institute of International Affairs, London-New York. 1957.
75. Webster V. Johnson & Releigh Barlowe, *Land Problems and Policies*, Mc. Graw Hill Book Company Inc, 1954. New York, Toronto, London.
76. Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta, Total Media, 2009.
77. Winahyu Erwiningsih, *Redistribusi Tanah Urgensi dan Implikasi Dalam Reformasi Agraria di Indonesia*. Dalam Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Moh. Mahfud MD., S.H. Restropeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan, Yogyakarta: FH-UII, PERS, 2007.
78. Zahir Ahmed, *Land Reform in South-East Asia*, Orient Longman Ltd., New Delhi, 1975.
79. Aplikasi, Erwin Kalolo. (2004) *Hukum Dalam Bisnis Properti di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak.

Pertemuan Ke-	Sasaran Pembelajaran/Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Topik Kajian/Materi	Bentuk/Metode/Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Mahasiswa mengetahui pengertian Hukum Agraria, Ruang Lingkup Perkembangan Hukum Agraria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak belajar 2. Penjelasan RPS, CPL, CPMK 3. Orientasi Perkembangan Hukum Agraria 4. Pengertian dan ruang lingkup Perkembangan Hukum Agraria 5. Selayang pandang Perkembangan Hukum Agraria dan relevansinya dengan pembelajaran program magister keagrarian. 	Komitmen sinergitas dosen mahasiswa <ul style="list-style-type: none"> • Kontrak Pembelajaran • Kuliah Interaktif • Penelusuran Pustaka 	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran • Keaktifan 	3%
II	Mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan hukum agraria tiap fase keberlakuannya	Karakteristik setiap Fase Perkembangan Hukum Agraria. <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi setiap fase 2. Perkembangan bidang Agraria yang menonjol pada setiap fase 3. Ciri khusus fase perkembangan hukum keagrariaan 	Kuliah dan diskusi interaktif	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran • Keaktifan dalam kelas dan diskusi • Kemampuan mengemukakan pendapat • Penguasaan materi diskusi • Kedisiplinan dan sopan santun 	5%

III	Mahasiswa menguasai konsep hukum agraria yang berlaku pada fase kerajaan dan fase berlakunya hukum agraria di masa VOC	Fase Kerajaan 1. Kerajaan Maritim a. Perkembangan Hukum Agraria Kerajaan Sriwijaya b. Perkembangan Hukum Agraria Kerajaan Majapahit 2. Kerajaan-kerajaan Nusantara 3. Masa VOC.	Kuliah dan diskusi interaktif	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran • Keaktifan di kelas • Kemampuan menjawab review materi pertemuan sebelumnya • Penguasaan konsep hukum agraria berdasarkan fase berlakunya 	5%
IV	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menguraikan struktur agraria pada pra penjajahan	Struktur Agraria Pra Penjajahan 1. VOC 2. Tanam Paksa 3. Hukum Adat versus Agrarische Wet 1870 4. Domein Verklaring	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Small Group Discussion • Analisi karakter hukum agraria 	3x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di kelas • Kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan 	5%
V	Mahasiswa memahami konsep keberlakuan dualisme hukum dan pluralisme hukum dalam hukum pertanahan di masa penjajahan	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Agraria Kolonial Belanda 1. Dualisme Hukum Penjajahan 2. Pluralisme Hukum Agraria • Hukum Jepang di bidang Agraria 	Kuliah dan diskusi interaktif	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran • Keaktifan dalam kelas • Ketepatan dalam menelaah prinsip-prinsip dasar hukum agraria dalam kasus konkrit • Kedisiplinan dan sopan santun 	5%

VI	Mahasiswa mampu menguraikan keberadaan hukum agraria pada masa transisi setelah kemerdekaan dan urgensi unifikasi hukum agraria nasional	Hukum Agraria Kemerdekaan I 1. Masa transisi 2. Dualisme hukum 3. Pluralisme dan Hukum Agraria antar Golongan 4. Usaha Unifikasi dan kodifikasi Hukum Agraria 5. Politik Hukum Keagrarian Indonesia Merdeka	Kuliah dan dikusi interaktif	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan dalam kelas Ketepatan dalam mengelompokkan hak-hak penguasaan atas tanah, baik tugas individu 	5%
VII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan politik hukum agraria setelah kemerdekaan	Hukum Agraria Kemerdekaan II 1. Usaha Unifikasi dan kodifikasi Hukum Agraria 2. Politik Hukum Keagrarian setelah kemerdekaan	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi Penugasan Terstruktur Presentasi 	3x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> Kehadiran Keaktifan Kemampuan menyelesaikan tugas sesuai materi yang diberikan Pemahaman materi dalam membuat tugas 	5%
VIII	Mid Semester	Ujian Tertulis		3x 50 menit		10%
IX	Mahasiswa mengetahui dan menganalisis tentang program landreform, tujuan landreform	Landreform Jilid I 1. Tanah Untuk rakyat (land to the tiller) 2. Pelaksanaan UU Pokok Agraria	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi Presentasi tugas Review materi 	3x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan Kemampuan menjawab quiz terkait materi pertemuan sebelumnya Kemampuan menjelaskan analisis tugas dalam bentuk presentasi 	6%

X	Mahasiswa memahami implementasi UUPA dan peran pemerintah dalam pengelolaan bidang keagrariaan dan membandingkan dengan pelaksanaan UUPA di masa sekarang	Fase Pemerintahan Orde Baru 1. Pelaksanaan UUPA 2. Sentralistik Pengelolaan Bidang Keagrariaan	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi • Presentasi • Tugas mandiri 	3x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan • Kemampuan menganalisis dan menelaah konsep pengelolaan bidang keagrariaan dalam hukum agraria nasional 	7%
XI	Mahasiswa mampu menguasai konsep reforma agraria, dasar hukum reforma agraria dan mengaitkannya dengan permasalahan terkait pelaksanaan reforma agraria	Reforma Agraria 1. Landreform Jilid II 2. Pelaksanaan UUPA 2. Desentralistik Pengelolaan Bidang-Bidang Keagrariaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi interaktif • Analisis perbandingan landreform dahulu dan reforma agraria 	3x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan memahami tujuan dasar reforma agraria • Mengetahui subjek dan objek reforma agraria • Ketepatan menguraikan proses tahapan R.A 	7%
XII	Mahasiswa mampu menelaah urgensi pembentukan UUPA dan wacana pembentukan UU Pertanahan.	Hukum Pertanahan 1. Wacana Pembentukan UU Pertanahan disamping keberlakuan UUPA 2. Urusan Pertanahan Sentralistik pada Era Desentralistik 3. Wacana Pembentukan UU Masyarakat Hukum Adat.	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Penugasan Terstruktur • Tugas Mandiri <p>Kajian ttg RUU Pertanahan dan urgensinya</p>	3x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran • Keaktifan dikelas • Penyelesaian tugas dengan tepat dan cermat dalam menganalisa. 	6%
XIII	Mahasiswa mampu menemukan implikasi dari hukum agraria yang berlaku sesuai era	Implikasi hukum masing –masing Fase perkembangan 1. Implikasi pengaturan 2. Implikasi Pengurusan	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi interaktif 	3 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di kelas • Kemampuan mengungkapkan 	7%

	keberlakuannya, dan memberikan suatu gagasan penyelesaian, Mahasiswa mengetahui dasar-dasar hukum ttg keagrariaan dan menganalisis keberadaannya	3. Implikasi Pengusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Review tugas terstruktur 		pendapat, gagasan dengan disertai dasar hukum dan alasan yang jelas	
XIV	<p>Mahasiswa mampu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan hubungan idiologi dengan perkembangan SDA • Mengurikan hubungan dasar perkembangan agraria dengan konstitusi • Menjelaskan dan menganalisa hukum agraria yang ada dengan sistem pemerintahan • Menelaah dan memahami konsep serta menghubungkan hukum agraria nasional dengan 	<p>Hubungan antar Fase Perkembangan SDAgraria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Idiologi yang dianut 2. Hubungan dasar Konstitusional 3. Hubungan sistem pemerintahan 4. Hubungan perkembangan Ekonomi Global 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi interaktif • Penugasan terstruktur • presentasi 	3x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • kehadiran • keaktifan • kemampuan menelaah dan menemukan keterkaitan perkembangan hukum agraria nasional dengan idiologi, dasar konstitusi, sistem pemerintahan dan perkembangan ekonomi global. 	6%

	perkembangan ekonomi global					
XV	<p>Mahasiswa mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjelaskan orientasi perkembangan hukum agraria • menemukan konsep pengaturan baik kelembagaan, tujuan perusahaan, pemanfaatan SDA dengan mengedepankan integrasi bangsa. 	<p>Perspektif dan Orientasi Perkembangan Hukum SDAgraria kedepan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan dan Kelembagaan Sejalan 2. Tujuan Perusahaan dan Pemanfaatan SDAgraria terwujud 3. Disintegrasi bangsa 				6
XVI	UJIAN AKHIR SEMESTERS	Ujian Akhir Semester ujian tertulis yang bersifat komprehensif dalam <i>problem solving</i> terhadap Perkembangan SDAgraria.				12%